

SITUASI KEBAHASAAN MASA KINI: KEPUNGAN PENGARUH BUDAYA GLOBAL

Ardianto

STAIN Manado, Sulawesi Utara

Abstract: *Bahasa Indonesia is a dynamic language. But, the dynamic seems uncontrolled and unregulated which negatively influenced the development of Bahasa Indonesia in future. Further, the disorder of Bahasa Indonesia also reflects the condition of the nation's culture in which people tend to violent the rules. Therefore, to counter the penetration of negative influence, firstly, the quality of Bahasa Indonesia must be enhanced. This effort can be started from promoting motivation and commitment in using good and correct Bahasa Indonesia in daily communication. Schools and other educational institutions must take part in this effort.*

Keywords: *Bahasa Indonesia, Budaya Global*

Sejak bulan Mei tahun 1995, pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan menggebu-gebu menganjurkan, bahkan tak jarang mengharuskan pemakaian bahasa yang “baik dan benar”. Dalam usaha ini yang dijadikan sebagai sasaran utama adalah kantor-kantor pemerintah, tentu juga terkait dalam sasaran ini para pejabat publik yang dapat dijadikan panutan oleh masyarakat. Dan, sasaran kedua adalah perusahaan, restoran, kompleks perumahan dan pertokoan (tentu saja yang mewah, yang telah memakai nama, dan malah pengumuman, dalam bahasa Inggris-bahasa yang mungkin dianggap keren, komersial, dan tampaknya juga *trendy*).

Gejala pemakaian bahasa Indonesia yang makin memprihatinkan dewasa ini ialah pencampuradukan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris atau bahasa asing lain. Para penyiar radio dan televisi pun tak jarang mencampur aduk pemakaian bahasa, seakan-akan para pendengarnya adalah orang yang baru saja belajar bahasa Indonesia atau, mungkin juga, agar mereka yang telah tahu bahasa Inggris tetap merasa “*at home*” ---kalau gaya bahasa penyiar radio dan televisi itu boleh ditiru.

Gejala pemakaian bahasa Indonesia lainnya yang umum dalam masyarakat kita adalah akronimisasi. Bahasa Indonesia dalam tata bahasanya mengenal istilah akronim. Yang tidak dikenal adalah akronim tanpa pola yang jelas. Dan, kecenderungan ini setiap harinya terus menjamur di kalangan pengguna bahasa Indonesia. Pertanyaannya, apakah gejala kebahasaan seperti ini dapat dipandang positif dalam konteks perkembangan bahasa Indonesia? Atau apakah hal tersebut merupakan bentuk pengaruh budaya global yang negatif?

SITUASI BAHASA INDONESIA MASA KINI

Ada dua jenis masalah besar yang dihadapi oleh penutur bahasa Indonesia masa kini yang dijadikan sorotan dalam tulisan ini. Yang *pertama* ialah masalah banyaknya unsur bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Masalah besar yang kedua ini dibagi pula atas terjadinya pungutan yang tidak perlu karena ada juga padanannya dalam bahasa Indonesia seperti *akselerasi* yang dapat diganti dengan *percepatan*. Kalau memang diinginkan penyegaran, carilah kata yang agak usang seperti kata *dilecehkan* untuk pengganti *dipandang remeh* karena di samping bentuknya agak panjang, juga nuansa maknanya lebih emosional.

Peremajaan bahasa sebagaimana dikemukakan oleh O'Neil (2004) memang lumrah terjadi sebagai pertanda bahwa bahasa itu dinamis. Dinyatakan oleh O'Neil (2004) "*every language can create new word to describe new situations and objects. Therefore, it is not surprising that all languages change through time. None is static*". Dikatakan lanjut oleh O'Neil, perubahan itu terjadi dalam percepatan yang berbeda pada waktu yang berbeda dalam merespons sosial, budaya, dan kondisi lingkungan yang baru. Beberapa negara menolak dengan keras penggunaan kata baru dari bahasa lain seperti respons Pemerintah Perancis terhadap invasi yang dramatis kata-kata bahasa Inggris, terutama budaya pop dan teknologi pada dekade yang baru lalu. Akan tetapi, kaula muda di negara-negara berkembang pada umumnya bersemangat memungut kata-kata baru tanpa menghiraukan usaha-usaha pemerintahnya untuk memelihara kemurnian bahasanya.

Kalau di negara-negara yang sedang berkembang tersebut di atas pemerintahnya berusaha memelihara bahasanya, sedangkan kaula mudanya menggebu-gebu mencari "penyegaran", di Indonesia tampaknya justru pemerintahnya cenderung memberi peluang terhadap peminjaman kata secara besar-besaran alih-alih memberi perlindungan terhadap bahasanya agar tidak banyak tercemar oleh unsur-unsur bahasa asing yang tidak perlu. Masalah peminjaman sebuah kata dalam suatu bahasa dari bahasa lain, lumrah terjadi. Yang tidak lumrah ialah tingginya frekuensi kata yang dipinjam dalam waktu yang relatif singkat. Ini dapat diukur dengan melihat gejalanya di surat kabar, misalnya dalam tulisan "... karena, baik SBY maupun Mega keduanya telah **diendorse** dengan **persepsi positif** oleh **market**". Dalam petikan ini, dua kata, yaitu *persepsi* dan *positif* merupakan stok lama, sedangkan yang baru adalah kata *market* dan terutama *diendorse*. Mengapa tidak ditulis kata **diendorse** dengan padanannya dalam bahasa Indonesia *disokong* atau *didukung* dengan persepsi positif oleh **pasar**?

Masalah yang lebih gawat dalam proses pemungutan bahasa asing ini ialah pemungutan frase yang lebih panjang dan dipungut secara utuh seperti antara lain *gang of three*, *Clean and Green City (CGC)*, *Ring Road*, *Technical Assistance Contract*, dan *ATM PANIN Night and Day* yang terpampang di jalan-jalan. Di pusat-pusat perbelanjaan dapat dibaca nama-nama toko dan perusahaan yang menggunakan bahasa Inggris secara utuh. Juga di sana dapat dibaca salah satu papan reklame yang bertuliskan telah dibuka **Fila Special Price**, padahal pengunjungnya pada umumnya orang Indonesia. Pemakaian bahasa Inggris yang berlebihan tersebut dapat dinilai sebagai akibat dari

pengaruh-pengaruh bahasa asing yang tidak disaring sehingga merusak keteraturan bahasa Indonesia. Hal ini dapat berakibat menurunnya motivasi siswa untuk meningkatkan penguasaan mereka berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertanyaan yang timbul ialah, mengapa harus digunakan bahasa dan pola struktur bahasa asing?

Masalah besar yang *kedua* ialah masalah menjamurnya pembentukan dan pemakaian akronim yang tidak memiliki pedoman sehingga tampak semrawut. Pencipta akronim hanya mengikuti selera sendiri tanpa mengikuti pembentukan akronim menurut definisinya, yaitu penyingkatan suatu frase menjadi sebuah kata yang mengikuti struktur fonem yang membentuk kata. Strukturnya ialah fonem akhir suku kata harus sederah artikulasi (homogen) dengan fonem suku awal yang mengikutinya. Contoh yang konkret ialah **depdiknas** yang digunakan dalam waktu sangat lama sebelum akhirnya diubah menjadi kemendiknas. Dalam contoh tersebut, fonem /p/ palatal di akhir suku kata pertama (**dep**) tidak seartikulasi dengan fonem dental /d/ pada fonem awal suku kata yang mengikutinya (**dik**). Begitu pula, fonem akhir suku kata kedua /k/ tidak seartikulasi dengan fonem awal suku kata ketiga /n/, yaitu fonem /k/ velar dan fonem /n/ dental pada awal suku kata ketiga sehingga gugus fonem yang diperoleh ialah /pd/ dan /kn/ yang masing-masing keduanya tidak seartikulasi. Hal ini sangat berbeda dengan kata murni bukan hasil pengakroniman seperti kata **kulintang**, fonem /n/ pada akhir suku kata kedua, seartikulasi dengan fonem /t/ yang merupakan fonem awal suku kata ketiga sehingga gugus fonemnya berupa /nt/ yaitu masing-masing berupa dental.

Hal seperti ini banyak sekali terjadi sehingga tidak dapat lagi dianggap sebagai sebuah kasus seperti antara lain, **kopkamtib**, **puskesmas**, **mobnas**, **balitbang**, **pilpres**, **pilkada**, **muscam**, **banwas**, **akper**, **menkes**, **panwaslu**, **pokja**, dan sebagainya. Gugus fonem semacam ini tidak terdapat dalam struktur kata bahasa Indonesia kecuali gugus **pra** dan **gra** seperti pada *prajurit*, *pranata*, dan *graha* yang masuk ke dalam bahasa Indoensia melalui bahasa serumpun (bahasa Jawa). Pembentukan akronim tidak dapat dihindari, namun bentuknya harus dapat dipolakan agar tidak terkesan *semau gue*. Penyimpangan atau kekecualian (anomali) dapat saja terjadi. Kalau penyimpangan itu sudah terlalu banyak, maka ia harus dapat dipolakan. Kalau tidak dapat dipolakan maka akan menimbulkan kesan kesemrawutan.

Masih dalam persoalan akronim, struktur fonem hasil akronim dan berperilaku sebagai sebuah kata, proses pembentukannya berupa penempatan unsur-unsurnya juga cenderung tidak berpola. Idealnya, unsur-unsurnya berasal dari fonem awal setiap kata pada frase yang akan diakronimkan. Kalau tidak memungkinkan, maka diambil setiap suku kata awalnya atau ditambah variasi berupa fonem, tetapi unsur suku katanya masih tampak seperti pada akronim *raker*, *panja*, *dekot*, dan sebagainya. Kalau hasil akronim itu sudah dalam bentuk seperti *kopkamtib*, *kamtibmas*, *kalapas* (Kepala Lembaga Pemasarakatan), *sesjen*, *ditjen*, dan sebagainya maka bentuk-bentuk seperti itu sukar dipolakan. Di samping struktur fonemnya yang tidak seartikulasi, unsur-unsurnya pun sukar dipolakan.

Di bawah ini dikutip contoh-contoh akronim yang dibuat di tingkat Kementerian Pendidikan Nasional; “Proyek Pendidikan Guru II; (a) mempunyai sasaran kuantitatif di samping misi peningkatan mutu, dan (b) secara organisatorik dipecah menjadi 3 bagian, yakni: Elemen A yang berkedudukan di **Ditdikgugentis Ditjen Dikdasmen**, Elemen B (P2LPTK) yang bernaung di bawah **Ditbinsarak Ditjen Dikti**, dan Elemen C yang berada di lingkungan **Pusdiklat Setjen Depdikbud**. Kalau sudah demikian keadaannya, maka penilaian yang dapat diberikan ialah *kekacauan* dalam bahasa. Bahasa mana pun di dunia ini, baik bahasa yang masyarakatnya masih sederhana, maupun masyarakat yang sudah modern, bahasanya selalu bersistem dalam arti semuanya dapat dipolakan.

Jadi, tidaklah semua unsur frase harus diakronimkan. Frase *dewan kota* tidak perlu diakronimkan menjadi *dekot*. Demikian juga halnya dengan *pemprov*, *kadis*, *mobnas*, *koabang*, kecuali *kadin* (kamar dagang dan industri) karena frasenya sudah lebih panjang. Kecenderungan akronimisasi itu merupakan gejala kemalasan atau pengefektifan? Jawabnya terserah kepada para pembaca. Usul tidak perlunya diakronimkan pada frase yang hanya dua buah kata dimaksudkan agar gejala ini tidak menjamur. Misalnya, **stok gusir** yang dimaksud persediaan *gula pasir*. Pengakroniman seperti itu dinilai terlalu berlebihan. Kalau hal seperti ini berlanjut, maka potensi terjadinya *gumer* (gula merah), *pisbon* (pisang ambon), dan sebagainya sangat besar.

DAMPAKNYA TERHADAP POLA PIKIR DAN POLA PERILAKU

Fungsi bahasa tidak hanya sekedar sebagai alat komunikasi. Ia juga memengaruhi kebudayaan dan bahkan proses berpikir (O’Neil, 2004) karena bahasa juga berfungsi sebagai alat berpikir. Dikatakan oleh O’Neil, selama empat dekade abad ke-20, bahasa dipandang oleh ahli bahasa dan antropologi Amerika, sebagai pembentuk persepsi terhadap realitas. Hal ini terutama dipengaruhi oleh pernyataan Edward Sapir dan diteruskan oleh muridnya yang menjadi lebih terkenal yaitu Benjamin Whorf yang mengatakan bahwa bahasa adalah penentu apa yang kita lihat di sekitar kita. Kebudayaan benar-benar merupakan bagian yang integral dari interaksi antara bahasa dan pikiran, pola-pola budaya, peradaban, dan pandangan hidup, dinyatakan dalam bahasa. Berdasarkan hasil penelitiannya pada bahasa-bahasa Indian di Amerika Serikat, Sapir dan Whorf membuat formulasi mengenai hubungan antara bahasa dan kebudayaan yang disebut Hipotesis Sapir-Whorf yang intinya sebagai berikut:

1. Pemakai bahasa yang strukturnya berbeda, menggambarkan dunianya secara berbeda pula.
2. Perbedaan struktur bahasa menyebabkan perbedaan dalam cara menggambarkan dunia.

Kedua rumusan itu disatukan menjadi: bahasa sebagai penentu persepsi realitas (James, 1980), atau bahasa merupakan penentu corak kebudayaan (Masinambow, 1985), atau struktur suatu bahasa memengaruhi cara manusia menafsirkan lingkungannya (Djawanai, 1985). Samsuri (1975) mengatakan bahwa dalam bahasa, terekam kebudayaan bangsa pemakai bahasa itu. Hipotesis Sapir-Whorf yang juga disebut Hipotesis Relativitas Bahasa ini

mendapat sorotan dari pakar linguistik, kebudayaan, dan psikologi, namun masih tetap bertahan. Kritik dari berbagai pihak menyebabkan terpecahnya penganut teori ini menjadi apa yang disebut versi kuat dan versi lemah (Nababan, 1984). Penganut versi kuat menyatakan bahwa bahasa mengatur perilaku seseorang, sedangkan penganut versi lemah menyatakan bahasa memengaruhi perilaku seseorang.

Dalam kaitan dengan pola-pola dan ungkapan dalam bahasa Indonesia, maka disebutkan bahwa bangsa Indonesia kurang menghargai waktu. Kita jarang menepati waktu secara cermat dalam kehidupan sehari-hari. *Tak lari gunung dikejar, alon-alon asal kelakon*. Itulah ungkapan-ungkapan yang memengaruhi sikap kita terhadap waktu. Selain itu, ada juga ungkapan yang mengatakan ketinggalan *kereta api*. Ungkapan-ungkapan ini menggambarkan budaya pasif, berbeda dengan budaya aktif, *the man of action* yang tergambar dalam bahasanya. Kata-kata kerja dalam bahasa Inggris banyak yang bersuku kata tunggal (De Madariaga dalam Krecht, Crutchfield, dan Ballachey, 1962). Tidak heran, ungkapan mereka ialah *miss the train* ‘gagal mengejar kereta api’, sedangkan bagi bangsa Indonesia ungkapannya ialah *ketinggalan kereta api*. Dalam ungkapan ini tercermin kepasifan, sedangkan dalam ungkapan *miss the train*, tergambar suatu usaha (aktif).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikhawatirkan kebiasaan membuat akronim lebih menjamur lagi akan membawa kita kepada budaya santai, bukannya mempercepat dan memperlancar komunikasi. Malahan, akronim-akronim yang banyak digunakan, dapat menghambat kelancaran komunikasi karena bentuk-bentuk akronim tersebut segera dapat dikodekan (*decoding*) oleh mitra bicara. Di samping itu, pemakaian akronim dapat menimbulkan budaya malas. Proses pembentukan akronim cenderung tidak berpola. Dengan perkataan lain, proses pembentukannya cenderung kacau karena tidak berpola dan sistem pemotongan kata tidak sesuai dengan sistem pembentukan suku kata sehingga jika akronim itu sudah berperilaku sebagai sebuah kata, maka struktur kata bahasa Indonesia tidak lagi berpola, padahal bahasa mana pun di dunia ini strukturnya mengikuti pola tertentu. Menurut O’Neil (2004), “*There are no “primitive” languages. All languages have a system of sounds, words, and sentences that can adequately communicate the content of culture. The languages of the so-called “primitive” peoples are often very complex in their grammatical structures*” (tidak ada bahasa primitif. Semua bahasa mempunyai sistem bunyi, kata, dan kalimat yang dapat mengkomunikasikan isi budayanya secara memadai. Bahasa-bahasa dari yang disebut orang-orang “primitif” sering kali struktur bahasanya sangat kompleks).

Di samping itu, pemakaian kata-kata bahasa Inggris yang berlebihan dapat menimbulkan pengaruh pada generasi muda dan terkesan, bangsa Indonesia sendiri yang tidak menghargai bahasanya. Akibatnya, para generasi muda tidak lagi memiliki apresiasi yang positif terhadap bahasanya dan tidak termotivasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai mana selalu dianjurkan oleh pemerintah, sedangkan bahasa Inggris yang diharapkan dipelajari oleh para generasi muda, tidak tercapai juga. Kebiasaan untuk meniru dan menggunakan bahasa Inggris yang tidak tertahankan demi

mengejar prestise merupakan salah satu dampak budaya global yang negatif. Tanpa disadari, hal ini merupakan tindakan mengorbankan bahasa Indonesia hasil cipta budaya nasional yang merupakan lambang identitas bangsa.

Cara yang dianggap paling tepat untuk menghargai bahasa Indonesia ialah memelihara bahasa, mencegah pencemaran dari bahasa lain. Pengaruh bahasa lain boleh saja, tetapi jangan mencemarinya. Cara lainnya untuk memupuk penghargaan terhadap bahasa Indonesia ialah dengan memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi. Artinya, untuk dapat memperoleh pekerjaan, harus dituntut keterampilan berbahasa Indonesia sesuai dengan posisi atau jenis pekerjaan yang dicari. Kalau kita memprioritaskan penguasaan bahasa Inggris, dikhawatirkan bahwa bahasa Indonesia makin ditinggalkan oleh warganya dan terbengkalailah bahasa Indonesia yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai suatu hasil budaya bangsa.

Menerampilkannya berbahasa Indonesia para peserta didik, tidak akan berhasil hanya dengan membenahi sistem pengajarannya. Depdiknas sudah menyelenggarakan penataran-penataran apa yang disebut P3G dan semacamnya selama kurang lebih 25 tahun atau sudah berlangsung selama satu generasi. Namun, hasilnya belum juga tampak secara signifikan. Yang lebih penting ialah menimbulkan motivasi. Mereka hidup di tengah situasi secara alamiah (*to acquire the language not to learn*). Mempelajari bahasa dalam setting alamiah jauh lebih mantap dibandingkan dengan mempelajarinya lewat jalur formal. Yang perlu dilakukan melalui jalur formal ialah penguasaan bahasa tulis. Bahasa tulis tidak dapat dilakukan melalui setting alamiah. Pembelajaran bahasa lisan melalui jalur formal lebih ditekankan pada aspek pragmatikanya sehingga dapat membangkitkan kepekaan dalam mempersepsi nuansa makna.

Pemakaian bahasa Indonesia yang cenderung kacau mencerminkan kekacauan kebudayaan bangsa dan cenderung berperilaku keluar dari aturan (berperilaku menerabas), bahkan melanggar rambu-rambu resmi yang sudah dibekukan oleh peraturan dan hukum. Badan-badan resmi pun cenderung tidak segan melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri. Mendisiplinkan masyarakat untuk mengikuti suatu norma atau aturan tertentu, ujicoba seperti pada penetapan bebas sampah untuk kawasan tertentu, ujicoba pemakaian helm, sabuk pengaman, dan sebagainya. Hingga kini belum tampak adanya ujicoba untuk membebaskan selokan atau sungai yang melintas di kota dari sampah sehingga selokan dan sungai masih tetap dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah secara liar.

PENINGKATAN MOTIVASI BERBAHASA INDONESIA

Motivasi berbahasa Indonesia yang baik dan benar pada masyarakat kita khususnya di kalangan peserta didik tampaknya masih rendah sehingga kemampuan mereka menggunakan bahasa itu rendah pula di seluruh jenjang pendidikan formal, seperti yang dikeluhkan oleh beberapa pengamat pendidikan, khususnya pendidikan bahasa Indonesia. Untuk menepis pengaruh budaya global yang negatif, kualitas berbahasa Indonesia perlu ditingkatkan. Agar kualitas yang diharapkan tercapai, motivasi perlu diaktifkan terlebih dahulu. Motivasi adalah hal yang sangat fundamental. Motivasi yang dinilai

masih rendah ini perlu dicari sebab-sebabnya mengapa demikian. Tanpa motivasi yang tinggi, usaha pencapaian kualitas sulit dicapai. Hal ini tampak pada usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional, baik berupa penyediaan perangkat keras, maupun berupa perbaikan perangkat lunak. Segi-segi perangkat kerasnya antara lain berupa penyediaan dan perbaikan sarana pendidikan dan perangkat lunaknya berupa pembenahan kurikulum yang hampir tiap lima tahun sekali ditinjau kembali. Terakhir, kembali digalakkan apa yang disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang kini cenderung menjadi mode.

Usaha-usaha perbaikan tidak akan berhasil secara signifikan jika perbaikan itu tidak dimulai dari akar permasalahannya, yaitu mulai dari manusia Indonesia yang menggunakan bahasa itu. Pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak tidak akan membuahkan hasil yang signifikan jika sikap pemakai bahasa Indonesia tidak berubah, yaitu sikap kurang menghargai budaya sendiri seperti yang dinyatakan oleh Kuntjaraningrat (1981), akibat kemiskinan oleh penjajahan yang berkepanjangan, manusia Indonesia kurang menghargai mutu, yang berakibat timbulnya perilaku yang menerabas, ingin cepat mencapai hasil tanpa usaha keras dan tidak makan waktu yang lama seperti timbulnya praktek jual beli ijazah, baik sebagai usaha untuk menduduki jabatan resmi, maupun sekadar peningkatan prestise di mata masyarakat yang berbuntut pada cemoohan masyarakat yang mengerti.

PENUTUP

Bahasa Indonesia perlu dilindungi dari pencemaran. Sebenarnya ada badan atau lembaga yang diharapkan dapat mencegah berlarut-larutnya kecenderungan pencemaran bahasa Indonesia itu. Badan atau lembaga resmi yang dimaksudkan ialah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (kini Pusat Bahasa), namun wewenangnya terbatas. Pernah diusulkan agar lembaga ini ditingkatkan statusnya menyamai LIPI, BKKBN, dan sejenisnya yang lebih independen sehingga wewenangnya lebih besar dan bersifat mengikat.

Juga perlu dicegah jangan sampai mereka yang berprestasi dalam bahasa Inggris lebih diuntungkan dalam pengembangan karir. Mereka yang memperoleh angka TOEFL yang tinggi sering diberi penghargaan “istimewa”. Di balik itu, belum tampak usaha untuk memberikan penghargaan yang layak kepada siswa yang berprestasi tinggi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Para pegawai yang mengikuti program pendidikan dan pelatihan untuk menduduki eselon tertentu dalam jabatan struktural, belum ada penghargaan khusus untuk dapat memotivasi mereka meraih sukses dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Malahan, mungkin belum ada semacam hukuman “tidak lulus” disebabkan oleh penguasaan bahasa Indonesia yang tidak memadai.

Situasi pemakaian bahasa Indonesia oleh masyarakat Indonesia haruslah tertib dan bebas dari anarkisme bahasa. Untuk mendukung hal ini, maka perlu untuk terus meningkatkan motivasi siswa dan masyarakat pada umumnya untuk mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia secara sungguh-sungguh. Perlu diingat, kerapuhan berbahasa adalah cermin dari penalaran yang sistematis dari penuturnya.

REFERENSI

- Djawanai, Stephanus. "Hubungan Antara Kebudayaan dan Bahasa dalam Alfian, (ed). 1985. *Persepsi Masyarakat terhadap Kebudayaan*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia.
- James, Carl. 1980. *Contrastive Analysis*. London : Longman Group Limited.
- Krech, David, Richard S. Crutchfield, dan Egerton L. Ballachey. 1962. *Individual in Society*. Tokyo: McGraw-Hill Kogakusha, Ltd.
- Kuntjaringanrat. 1981. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia.
- Masinambow, E.K.W. "Perspektif Kebahasaan terhadap Kebudayaan", dalam Alfian (ed). 1985. *Persepsi Masyarakat tentang Kebudayaan*. Jakarta : Penerbit PT Gramedia.
- Nababan, P.W. J. 1984. *Sosiolinguistik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia.
- O'Neil, Dennis. 2004. *Language and Culture, An Introduction to Human Communication*. Internet. <http://Antro:palomar.edu/language/>
- Sadtono, E. 1976. "Bahasa Indonesia Tertulis Golongan Terdidik (Sarjana) di Indonesia", dalam *Majalah Pengajaran Bahasa dan Sastra* Tahun I No. 5 1976. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Samsuri. 1975. "Kebudayaan, Masyarakat dan Bahasa Indonesia", dalam *Buletin Yaperma*, Thn II, No. 6 April 1975.
- Tallei, 1981. "Sekitar Pengajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar", dalam *Majalah Pembinaan Bahasa Indonesia*" Jilid II, No. 4.
- Umaedi. 2000. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.